



Tan Malaka: Dari Gerakan hingga Kontroversi

Uun Lionar^{1*}, Ridho Bayu Yefterson¹, Hendra Naldi¹

*Corresponding author Email: uunlionar@fis.unp.ac.id

¹Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Abstrak: Ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Soekarno di tahun 1963, Tan Malaka hingga saat ini masih menjadi pahlawan yang “redup”. Keterlibatannya dalam tubuh Partai Komunis Indonesia (PKI) di masa Hindia Belanda telah menempatkan Tan Malaka pada posisi sulit, mengingat keberadaan PKI yang telah mengukir sejarah kelam di era kemerdekaan. Padahal, jika memperhatikan ide dan gagasan Tan Malaka yang tertuang dalam banyak karyanya, maka selayaknya ia dijuluki sebagai Bapak Republik. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kiprah Tan Malaka dalam pergerakan nasional dan mengeksplorasi titik kontroversi Tan Malaka. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari tahap heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa titik kontroversial Tan Malaka terletak pada keterlibatannya di tubuh PKI masa Hindia Belanda, namun demikian Tan Malaka adalah seorang nasionalis yang konsisten memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia melalui ideologi yang diyakininya. Adanya larangan ajaran Marxisme-Komunisme pasca pemberontakan PKI di tahun 1965 membuat Tan Malaka semakin terpinggirkan sebagai pahlawan nasional, selama Orde Baru namanya tidak terdapat dalam buku-buku pelajaran di sekolah maupun dalam Album Pahlawan Nasional, hal ini menjadi kontroversi atas keterlibatannya di tubuh PKI. Namun, Era Reformasi menunjukkan sebuah kemajuan, buku-buku karangan Tan Malaka kembali dicetak dan banyak ilmuwan mulai serius menyelami sosok Tan Malaka, terutama berkenaan dengan pemikiran dan gagasannya.

Kata Kunci: Tan Malaka, Kontroversi, Revolusi

Tan Malaka: From Movement to Controversy

Abstract: Defined as a National Hero by President Soekarno in 1963, Tan Malaka is still a “dim” hero. His involvement in the Indonesian Communist Party (PKI) during the Dutch East Indies had put Tan Malaka in a difficult position, given the existence of the PKI which had carved a dark history in the era of independence. In fact, if you pay attention to Tan Malaka’s ideas and ideas contained in many of his works, then he should be called the Father of the Republic. This research aims to examine Tan Malaka’s progress in the national movement and to explore the points of controversy of Tan Malaka. The method in this study uses the historical method which consists of 4 (four) stages, namely heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The findings of this study indicate that Tan Malaka’s controversial point lies in his involvement in the PKI during the Dutch East Indies, however, Tan Malaka was a nationalist who consistently fought for the ideals of Indonesian independence through the ideology he believed in. The prohibition against the teachings of Marxism-Communism after the PKI rebellion in 1965 made Tan Malaka even more marginalized as a national hero, during the New Order his name was not included in school textbooks or in the National Hero Album, this became a controversy

over his involvement in the PKI. However, the Reformation Era showed progress, Tan Malaka's books were again printed and many scientists began to seriously delve into the figure of Tan Malaka, especially with regard to his thoughts and ideas.

Keywords: *Tan Malaka, Controversy, Revolution*

PENDAHULUAN

Dalam pembelajaran sejarah di sekolah nama Tan Malaka tidak banyak mendapat tempat sebagai topik bahasan, walaupun tersebut di dalam buku teks pelajaran namanya lebih ditempatkan sebagai tokoh penghalang perjuangan diplomasi di masa revolusi fisik (1945-1949). Anggapan demikian karena Tan Malaka berada pada garis perjuangan radikal yang revolusioner, ia memilih jalan tanpa kompromi dengan Belanda. Sikap tersebut mengharuskan Tan Malaka berhadapan dengan Soekarno, Hatta, dan Syahrir yang mencoba membangun diplomasi dengan pihak Belanda untuk meraih pengakuan kemerdekaan Indonesia (Kahin, 2013: 446; Kusno, 2003: 327). Akumulasi dari perjuangan Tan Malaka tersebut mengharuskan ia menjadi tumbal revolusi, ditangkap hingga terbunuh karena dianggap sebagai pelemah kekuatan perjuangan bagi kelompok pro diplomasi.

Pasca revolusi fisik, Presiden Soekarno menetapkan Tan Malaka sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1963, dengan demikian Tan Malaka pun menjadi anggota barisan pahlawan nasional (Poeze, 2013: 158). Namun, anugerah yang diterimanya tidak menempatkan Tan Malaka sebagai pahlawan yang betul-betul dikenal. Sejak penetapan tersebut nama Tan Malaka selalu “redup” dan tidak serius dibahas di muka publik, bahkan pada era Orde Baru nama Tan Malaka tidak terdapat dalam buku-buku pelajaran di sekolah maupun dalam Album Pahlawan Nasional. Hingga saat ini posisi Tan Malaka sesungguhnya amat pelik untuk dibahas karena bersama namanya tersebut juga melekat pemikirannya yang bersentuhan dengan paham Marxisme-Komunisme yang terlarang di Indonesia.

Secara intelektualitas sesungguhnya Tan Malaka adalah seorang nasionalis yang turut serta merajut *the imagined community* melalui jalannya sendiri (Kahin, 2008, hlm. 232). Di era pergerakan, Tan Malaka secara jelas menempatkan dirinya sebagai seorang marxisme di tengah kalangan nasionalis, bahkan dalam pelariannya ia pun terlibat dalam jaringan Komunis Internasional (Jarvis, 1987: 16). Namun, sebagai penganut marxisme, ia bukanlah marxisme fundamentalis, Tan Malaka menjadikan marxisme sebagai alat

perjuangan untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia. Hal ini dapat ditemukan dari beberapa karyanya seperti dalam *Naar De Repuliek Indonesia* (1925) yang di dalamnya merupakan gambaran dari negara Indonesia di masa depan yang dicita-citakan oleh Tan Malaka, dalam buku ini juga dibahas mengenai bentuk negara, hingga struktur pemerintahan. Buku *Massa Actie* (1926) terbit di tahun berikutnya, buku ini disambut oleh kalangan nasionalis dengan penuh gairan, mengingat ketika itu gerakan anti kolonialisme sedang menggeliat. *Massa Actie* menjadi minyak tanah yang menimbulkan percik perlawanan terhadap kolonialisme semakin berkobar, dalam buku ini terdapat uraian yang mengungkap sejarah ringkas akan arti sebuah kedaulatan, arti revolusi, dan kejahatan kolonialisme. Dalam *Massa Actie* sarat dengan seruan dan propaganda revolusi dan pembebasan dari dominasi kekuasaan Belanda.

Jika ditelaah lebih kritis pada dasarnya pemikiran Tan Malaka lebih dini dan lebih radikal dibandingkan dengan pemikiran Mohammad Hatta yang menulis *Indonesia Vrije* (*Indonesia Merdeka*) sebagai pledoi di depan pengadilan Belanda di Den Haag tahun 1928, atau tulisan Soekarno *Menuju Indonesia Mereka* tahun 1933 (Gustaman, 2017: 64). Di balik pemikiran yang radikal di masa pergerakan tersebut, ternyata nama Tan Malaka tidak begitu mendapat tempat di alam kemerdekaan. Selain aksi yang gagal atas sikap kontra terhadap usaha diplomasi pada masa revolusi fisik, bayang-bayang marxisme yang melekat pada sosok Tan Malaka telah menempatkannya sebagai tokoh yang kontroversial, terutama di era Orde Baru yang sangat anti paham tersebut. Akibatnya nama Tan Malaka seolah tidak pernah secara serius dikenalkan kepada kalangan masyarakat, terutama pada generasi muda dalam dunia pendidikan (Samidi & Suharno, 2019: 143). Ketika pembicaraan mengenai perjuangan Tan Malaka diadakan di forum-forum publik, berbagai anggapan pun bermunculan hingga mengaitkannya dengan ajaran Marxisme-Komunisme.

Meskipun berada pada posisi yang sulit, sosok Tan Malaka telah memberikan kontribusi terhadap perjuangan meraih kemerdekaan Indonesia. Ketokohan Tan Malaka pada dasarnya adalah jawaban dari jiwa zamannya. Gagasan orisinal yang mengedepankan konsistensi dan kemandirian menjadi ciri dan watak Tan Malaka. Maka oleh sebab itu, membahas perjuangan Tan Malaka dalam periode pergerakan menjadi penting sebagai “entry point” dalam mengeksplorasi dan menemukan titik kontroversi untuk kemudian menjadi wacana dalam pendidikan sejarah yang kritis. Penelitian ini bertujuan untuk

menelaah kiprah perjuangan Tan Malaka dalam pergerakan nasional dan mengeksplorasi titik kontroversi Tan Malaka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan kajian kepustakaan yang bertumpu pada referensi yang relevan mengenai pokok bahasan. Metode ini terdiri dari 4 (empat) tahapan, (1) hauristik; (2) kritik sumber; (3) interpretasi; dan (4) historiografi (Gottschalk, 1975: 16). Hauristik dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber yang berkaitan dengan Tan Malaka untuk mendapatkan data yang relevan. Beberapa sumber pustaka ditelaah dalam penelitian ini berkaitan dengan dinamika pergerakan kebangsaan selama periode 1900 sampai 1945, terkhusus mengenai Tan Malaka seperti tulisan Jarvis *Tan Malaka: Revolutionary or renegade?* (1987), Mrázek *Tan Malaka: A Political Personality's Structure of Experience* (1972), dan Poeze *Tan Malaka Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia* (2008).

Setelah sumber-sumber mengenai Tan Malaka didapatkan maka dilakukan kritik sumber, untuk mengetahui keaslian sumber yang didapat. Kritik sumber juga dilakukan untuk menelusuri apakah sumber tersebut dapat dipercaya, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan (Sjamsuddin, 2016: 83–84).

Tahap berikutnya adalah melakukan interpretasi, yakni menafsirkan atau memberi makna kepada data yang telah didapatkan. Pada tahap ini terdapat dua hal yang dilakukan, yakni menganalisis dan mensintesis. Interpretasi terhadap data mengenai Tan Malaka dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara satu data dengan data yang lainnya, satu fakta dengan fakta lainnya, sehingga terbangun suatu pemahaman yang utuh mengenai pokok bahasan. Tahap terakhir adalah historiografi yakni menyajikan narasi sejarah atau tulisan sejarah sebagai sebuah bentuk laporan atas jawaban dari masalah yang harus dijawab. Historiografi dalam penelitian ini berupa narasi mengenai perjuangan Tan Malaka dan titik kontroversialnya sebagai pahlawan nasional.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kontroversi Sejarah

Sifat kontroversial hampir selalu ada dalam sejarah, hal ini karena sejarah senantiasa berproses dan bukan sesuatu yang sudah selesai, sehingga kecenderungan munculnya fakta-fakta dan interpretasi-interpretasi baru terhadap suatu peristiwa sejarah selalu terbuka. Sejarah kontroversial senantiasa muncul akibat dari berbedanya pandangan mengenai suatu peristiwa sejarah di kalangan sejarawan atau masyarakat. Hal ini dilandasi oleh perbedaan penggunaan sumber sampai pada masalah interpretasi yang berbeda (Ahmad, 2016: 9). Kochhar (2008: 34) menegaskan bahwa hampir setiap sejarah yang diajarkan merupakan suatu yang kontroversial atau memiliki unsur kontroversial di dalamnya. Semakin banyak kita menginterpretasikan masa sekarang dengan bantuan masa lalu, semakin besar pula kemungkinan ditemukannya unsur-unsur kontroversial.

Identifikasi penyebab dari timbulnya kontroversi dalam sejarah adalah terkait dengan (1) masalah metodologis, yang berhubungan dengan dialektika akademis sejarawan dalam mengkonstruksi sejarah, dan (2) masalah kepentingan historiografis, yang berhubungan dengan aspek sosial politik (Ahmad, 2016: 8). Permasalahan metodologis memiliki akar subjektivitas dalam penelitian sejarah, mengingat sejarah dalam pengertian *histoire recite* (kisah tentang peristiwa) merupakan hasil historiografi yang dipandang serba subjektif karena telah melibatkan interpretasi dari sejarawan, berbeda halnya dengan *histoire realite* (kejadian sebenarnya/peristiwa) yang bersifat objektif sebagaimana ia terjadi (Kartodirdjo, 2014:17). Karena merupakan hasil rekonstruksi kembali oleh sejarawan maka unsur subjektivitas melekat dalam sebuah historiografi atau karya sejarah (Sjamsuddin, 2012: 12–13). Namun, perlu dibedakan antara subjektivitas dan subjektivisme, subjektivitas dalam penelitian merupakan sebuah keniscayaan, tetapi subjektivisme adalah sebuah kekeliruan atau kesewenangan sejarawan dalam memilih, mereduksi, dan menafsirkan data (Poespoprodjo, 1987: 13).

Terkait historiografi, Abdullah & Surjomiharjo (1985, hlm. xv) menegaskan bahwa apa yang telah ditulis oleh sejarawan itulah sejarah, dimana sejarawan mencoba menangkap dan memahami *histoire realite*. Hasil penulisan itu disebut historiografi, yakni pengerjaan studi sejarah yang akademis kritis, dan berusaha sejauh mungkin mencari kebenaran historis dari setiap fakta yang bermula dari suatu pertanyaan pokok. Historiografi terkadang

akan menjadi kontroversi, hal ini disebabkan oleh pengaruh kepentingan politis, ideologis, dan pragmatis dari sekelompok orang (penguasa maupun bukan penguasa) (Sumardiansyah, 2015: 79).

Purwanto (2009) memberi istilah “politik historiografi” berupa penyaringan narasi sejarah yang diterima dan yang dilarang. Purwanto menyebutkan bahwa secara teoritis, sejarah dan pembelajarannya menjadi kontroversial ketika penulisan sejarah, penyusunan kurikulum sejarah, dan proses pembelajaran sejarah menjadi bagian yang integral dari politik kekuasaan sebuah rezim. Kontroversial biasanya diproduksi dan direproduksi dari sebuah subjektivitas ekstrim politik kekinian negara atau rezim yang mendikte tradisi keilmuan sejarah, penyusunan kurikulum, materi ajar, dan proses pembelajarannya (Ahmad, 2016: 33). Pada kecenderungannya subjektivitas ekstrim politik tersebut dilakukan negara dalam rangka untuk mengukuhkan ideologi negara, oleh sebab itu meminjam istilah Abdullah & Surjomiharjo (1985: 27–29) sejarah demikian dapat dikatakan sebagai “sejarah ideologis”. Selain “sejarah ideologis” juga dikenal “sejarah pewarisan” dan “sejarah akademik”.

Tan Malaka dan Pergerakan Nasional

Tan Malaka dilahirkan di Pandan Gadang, Suliki, Limapuluh Koto, Sumatra Barat (*Sumatra West'kust*) pada tanggal 14 Oktober 1897. Sebutan Tan Malaka sebenarnya bukan nama asli, tetapi adalah gelar adat, nama asli Tan Malaka adalah Ibrahim. Ketika gelar Tan Malaka diberikan kepada Ibrahim, maka ia bernama Sutan Ibrahim Datuk Tan Malaka, yang diwarisi menurut garis keturunan ibu (Poeze, 2013: 171). Sutan Ibrahim Datuk Tan Malaka setelah tamat belajar di Sekolah Raja (*Kweekschool*) pada Oktober 1913, bersama seorang gurunya yang bernama Horesma berangkat ke Belanda untuk melanjutkan pendidikan di Sekolah Guru (*Rijkskweekschool*) di Harleem (1913-1915). Tan Malaka mendapat bantuan biaya dari *Yayasan Engku Fonds*. Biaya itu dianggap sebagai pinjaman yang akan dibayarnya kelak apabila sudah bekerja dan berpenghasilan (Gustaman, 2017: 63). Selama belajar di Belanda Tan Malaka mulai belajar politik, membaca buku-buku politik, dan rajin mengikuti ceramah serta diskusi bersama tokoh aktivis sesama pelajar, termasuk pelajar dari Indonesia.

Perang dunia I (1914-1918) dan revolusi di Rusia yang melahirkan negara sosialis pertama di dunia sangat mempengaruhi situasi dan suasana politik di Eropa, termasuk negeri Belanda. Pengaruh aliran kiri (sosialis) sangat kuat, Tan Malaka bersama pelajar Indonesia pun menyerap pengaruh ini melalui bacaan karya Karl Marx, Engels, dan Lenin, karena tertarik pada keberhasilan revolusi proletar Rusia tersebut (Jarvis, 1987: 44).

Pada tahun 1920 Tan Malaka kembali ke Hindia Belanda atas permintaan Dr. C.W. Janssen, direktur perkebunan Tanjung Morawa, Deli, Sumatra Timur. Tan Malaka kemudian diminta menjadi guru di sekolah yang didirikan oleh perkebunan tersebut (Mrázek, 1972: 28). Atas gejolak yang dirasakannya dengan melihat bagaimana penindasan dilakukan pada kaum petani perkebunan di Tanjung Morawa membuat matanya terbuka untuk memikirkan gerakan melawan sistem kapitalis tersebut. Pada tahun 1921 Tan Malaka meminta berhenti sebagai guru dan hijrah ke pulau Jawa, dengan kota tujuan yakni Semarang, dimana sebuah Partai Komunis Indonesia (PKI) belum lama berdiri di kota tersebut (Ricklefs, 2016: 266).

Sesampainya di Semarang Tan Malaka bertemu dengan Semaun, seorang tokoh kiri murid H.J.F.M. Sneevliet (1883-1942) yang berupaya mempengaruhi Serikat Islam (SI) untuk kemudian dijadikan basis kekuatan komunis (Ricklefs, 2016: 267). Semaun memberi tempat kepada Tan Malaka untuk mengelola Sekolah Rakyat SI. Sekolah yang dikelolanya berkembang pesat, dalam otobiografinya *Dari Penjara ke Penjara* (2016: 96), Tan Malaka menyebutkan "... di mana-mana berdiri sekolah rakyat model Sekolah Rakyat. Di antara pekerjaan murid termasuk juga pembentukan barisan muda, serekat muda, dan kependuan. Saat waktu luang dibuat kursus kilat untuk membentuk propogandis yang aktif, awalnya dalam rapat terbuka, kemudian dalam rapat anggota atau rapat tertutup terbatas".

Selama berada di Semarang Tan Malaka terseret untuk ikut serta dalam gerakan buruh, hal ini disebabkan dari kegelisahannya melihat sistem kapitalis yang kian kuat menindas rakyat kecil terutama kaum tani dan buruh. Di tahun 1921 Tan Malaka terpilih sebagai wakil ketua Serikat Pegawai Pelikan Hindia Belanda, dengan Semaun sebagai pendiri dan ketuanya. Ketika Semaun sedang menghadari kongres buruh di Moskow, akibatnya jabatan ketua PKI kosong, sementara banyak masalah yang harus diselesaikan ketika itu menyangkut perjuangan kaum buruh dan tani. Desember 1921, PKI melaksanakan kongres ke-8 di Semarang, pada saat ini Tan Malaka pun dipercaya sebagai ketua partai. Menyandang peran sebagai ketua membuat ia menjadi sasaran penangkapan atas berbagai aksi

pemogokan yang dipelopori oleh PKI. Tidak berselang lama, pada tanggal 13 Februari 1922 ketika sedang berada di Bandung dalam rangka memeriksa gedung sekolah rakyat Tan Malaka pun di tangkap oleh polisi Hindia Belanda (Gustaman, 2017: 64).

Menurut putusan Pemerintah Hindia Belanda Tan Malaka di buang ke Kupang, namun ia meminta dibuang ke luar wilayah Hindia Belanda. Permintaan Tan Malaka tersebut kemudian dikabulkan dengan putusan Pemerintah Hindia Belanda tanggal 10 Maret 1922, No. 2 yang menyatakan agar Tan Malaka secepat-cepatnya meninggalkan Hindia Belanda. Di bulan September 1922 Tan Malaka sudah sampai di negeri Belanda, berselang beberapa bulan ia menuju kota Berlin dan Moskow untuk menghadiri Kongres Komitern (Komunis Internasional) ke-4 di bulan November 1922 (Kahin, 2013: 105). Dalam kongres tersebut Tan Malaka mendapat perhatian banyak orang, hal ini disebabkan oleh sikapnya pro terhadap Pan Islamisme yang ketika itu oleh Komitern dianggap sebagai kekuatan kaum borjuis. Sebaliknya Tan Malaka berpendapat lain, bahwa penting menjalin kerja sama dengan Pan Islamisme, ia mencontohkan Hindia Belanda yang mayoritas penduduk Islam adalah petani dan buruh miskin yang masih tertindas kemerdekaannya (Mrázek, 1972: 28). Dalam kongres ini Tan Malaka diamanahkan sebagai wakil Komitern untuk wilayah Asia Tenggara. Maka mulailah pengembaraannya selama 20 tahun, diuber-uber polisi rahasia di Moskow, Manila, Hong Kong, Bangkok, Singapura, Shanghai, dan ibu kota lainnya sebelum ia kembali ke Hindia Belanda pada 1942, setelah militer Jepang menguasai Asia Tenggara. Pada bulan Desember 1923 ia membuka kantor pusat di Canton, lalu pindah ke Manila pada tahun 1925, dan kemudian ke Singapura pada tahun 1926 (Faisal & Syam, 2015: 1576; Kahin, 2008: 77-80).

Selama pengembaraannya Tan Malaka menggunakan 13 alamat rahasia dan banyak nama samaran. Di Manila ia dikenal sebagai Elias Fuentes dan Estahislau Rivera, dan di Filipina Selatan ia dikenal sebagai Hasan Gozali. Di Shanghai dan Amoy ia bernama Ossario, wartawan Filipina. Ketika menyeludup ke Burma ia mengubah namanya menjadi Oong Soong Lee, orang Cina kelahiran Hawaii. Di Singapura ketika menjadi guru Bahasa Inggris di sekolah menengah atas ia bernama Tan Ho Seng, dan setelah kembali ke Indonesia lalu bekerja di Bayah, Banten ia menjadi Ilyas Husein (Kleden, 2015: 35-36).

Selama periode “pengembaraan” Tan Malaka telah menghasilkan banyak karya sebagai buah pikir petualangannya, karya yang begitu fenomenal diterbitkan pada tahun

1925 dalam bahasa Belanda dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yakni *Naar de Republiek Indonesia* (Menuju Republik Indonesia) yang di tulis di Kanton. Tulisan ini diyakini sebagai awal dari konsep “Republik Indonesia” dicanangkan, dan disusun berdasarkan realitas obyektif yaitu keadaan rakyat Indonesia yang semakin tertindas dan menderita akibat penjajahan kaum kolonial. Artinya konsepsi tersebut bukanlah berdasar pada ide atau alam pikirnya semata tapi berlandaskan pada materi ataupun kenyataan obyektif (Malaka, 2013: 13).

Sekitar tahun 1926-1927 PKI di Hindia Belanda menggeliat untuk melakukan gerakan pemberontakan terhadap pemerintah. Melalui hasil rapat PKI di sekitar Candi Prambanan (Yogyakarta) pada Oktober 1925 gerakan pemberontakan segera dilakukan dibawah pimpinan Alimin dan Muso. Mendengar kabar akan dilaksanakannya pemberontakan tersebut Tan Malaka menolak, dalam pertemuannya dengan Alimin di Manila ia menjelaskan bahwa agar PKI menahan diri untuk tidak tergesa-gesa melakukan pemberontakan, mengingat kesiapan, kekuatan organisasi, situasi internasional, dan kekuatan pemerintah Hindia Belanda ketika itu. Tan Malaka ketika itu mengatakan “Saya mendengar keputusan ini di Manila menjelang akhir Maret 1926. Saya diundang ke Singapura, tetapi bukan untuk membicarakan kesiapan PKI memimpin revolusi melawan Belanda, atau bagaimana PKI akan memimpin revolusi tersebut. Saya diundang ke Singapura dengan tujuan untuk memberitahukan hal ini ke Moskow bersama Musso. Di sana kami akan meminta persetujuan dan dukungan moral karena keputusan yang diambil di Prambanan bertentangan dengan peraturan Komitern” (Kahin, 2013: 114). Konkretnya Tan Malaka menyarankan agar Alimin bersama rekannya membatalkan gerakan pemberontakan tersebut. Usulan Tan Malaka pada akhirnya tidak diindahkan oleh PKI yang kemudian mengakibatkan terjadinya pemberontakan yang prematur di beberapa tempat yakni di Jawa Barat dan Sumatra Barat.

Melihat kenyataan yang memukul mundur perjuangan, tentu Tan Malaka tidak bersedia bertanggung jawab atas aksi tersebut. Sejak tahun 1926 Tan Malaka melepaskan diri dari PKI dan Komitern. Tan Malaka akhirnya menempuh jalan sendiri dalam memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Sementara itu, orang-orang PKI menuduhnya sebagai biang penyebab kegagalan pemberontakan, Tan Malaka dimusuhi dan dicap sebagai penghianat partai.

Pada Juli 1927 Tan Malaka bersama rekannya Tamin dan Subakat mendirikan Partai Republik Indonesia (PARI) di Bangkok, Thailand. Partai ini bergerak di bawah tanah sebagai basis perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuan jangka pendek partai adalah melatih buruh bawah tanah Indonesia di Bangkok yang akan kembali ke Hindia Belanda (Kusno, 2003: 331). Diharapkan setelah kembali ke Hindia Belanda mereka akan melatih anggota lain serta membentuk kader bawah tanah. Sementara tujuan jangka panjang adalah pembentukan gerakan proletarian yang terkoordinasi dalam Asia Tenggara dan Australia (ASLIA) (Kahin, 2013: 119).

Revolusi dan Gerakan Tan Malaka

Tan Malaka adalah “revolusioner yang kesepian” (*een eenzame revolutioner*), hal ini disematkan Poeze (2008) kepadanya, karena melihat perjalanan hidupnya yang penuh dengan pengembaraan dan kesendirian. Tan Malaka kembali ke Hindia Belanda pada Juli 1942, kegiatannya adalah mempelajari keadaan Hindia Belanda setelah ditinggalkannya selama dua puluh tahun (sejak 1922), ia menetap di Bayah, Banten dan bekerja sebagai juru tulis di perusahaan tambang batu bara yang merupakan bagian dari praktek *Romusha* (Malaka, 2016: 524).

Awal dari keikutsertaan Tan Malaka dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan terilhami dari heroisme pemuda dalam pertempuran di Surabaya. Dalam brosur *Moeslihat* yang ditulis tiga minggu setelah pertempuran, ia mengajak semua pihak bersatu melawan serangan musuh, dan membentuk laskar rakyat. Bagi Tan Malaka revolusi lahir karena adanya perubahan sosial yang memaksa masyarakat untuk melakukan perubahan tersebut. Selanjutnya, revolusi lahir bukan atas keinginan manusia, revolusi lahir secara alami atas dasar kondisi sosial yang tidak adil. Revolusi merupakan alat untuk melakukan pembebasan terhadap penindasan (Malaka, 2013a, hlm. 56). Hal itu dijelaskan oleh Tan Malaka dalam buku *Massa Aksi* yang ditulisnya setelah kegagalan pemberontakan PKI pada 1926. Kegagalan tersebut memberikan ide bagi Tan Malaka untuk merumuskan buku *Massa Aksi*, dengan harapan dapat menjadi sumber atau panduan dalam melakukan perjuangan (Kahin, 2013: 115).

Gagasan Tan Malaka kemudian mengundang simpati beberapa kelompok. Pada tanggal 3 Januari 1946, untuk pertama kalinya Tan Malaka menjadi pembicara utama dalam

kongres besar Persatuan Perjuangan yang terdiri dari 139 organisasi (Masyumi, PNI, Parindra, PSI, PKI, Front Rakyat, PSII, dan unsur laskar lainnya). Dalam waktu singkat Persatuan Perjuangan pun menjadi kelompok oposisi kuat yang menentang diplomasi yang dilakukan oleh kabinet Syahrir ketika itu. Bagi Tan Malaka proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah harga mati. Kompromi para pemimpin politik menghadapi Belanda adalah naif dan melelahkan (Poeze, 2015: 114). Namun, gerakan yang dilakukan Tan Malaka tidak berlangsung lama, pada 17 Maret 1946 ia ditangkap dengan tuduhan mengacau dan menghambat perjuangan. Selang empat bulan kemudian beberapa anggota Persatuan Perjuangan juga ditangkap, dan hal ini menandakan bubarnya Persatuan Perjuangan tersebut.

Selama dua tahun dipenjara Tan Malaka berhasil menulis buku otobiografinya *Dari Penjara ke Penjara*. Ia dibebaskan pada bulan September 1948 semasa Perdana Menteri Mohammad Hatta. Tiga bulan setelah keluar dari penjara Tan Malaka kemudian mendirikan Partai Murba pada tanggal 7 November 1948, partai ini merupakan fusi dari Partai Rakyat, Partai Rakyat Jelata, dan Partai Indonesia Buruh Merdeka. Partai Murba didirikan setelah tersingkirnya PKI pasca peristiwa Madiun September 1948, dan bertepatan dengan hari peringatan revolusi Rusia (Suryadinata & Aman, 2016: 5). Pokok perjuangan Partai Murba terdapat dalam konstitusinya antara lain: (1) dasar partai adalah anti-fasisme, anti-imperialisme, dan anti-kapitalisme; (2) mengadakan perundingan dengan Belanda berdasarkan pengakuan penuh setelah pasukan-pasukan asing meninggalkan Indonesia; (3) mengambil alih dan memanfaatkan harta milik musuh; (4) nasionalisasi dan kepemilikan bersama usaha-usaha ekonomi vital (meliputi perkebunan, tambang, industri, dan transportasi); (5) nasionalisasi perbankan serta ekspor dan impor; (6) memperjuangkan Indonesia menjadi anggota PBB dan organisasi-organisasi internasional atas dasar persamaan status dan demokrasi, dengan tujuan membentuk pemerintahan dunia yang proletar; dan (7) membentuk organisasi Partai Murba menurut prinsip “Sentralisme Demokrasi” (Kahin, 2013: 442–446).

Partai Murba tidak mendapat waktu banyak untuk berkembang. Pada bulan Desember 1948, Belanda merebut ibukota Yogyakarta dan menahan Soekarno, Hatta, dan pemimpin lainnya. Tan Malaka yang ketika itu menamakan dirinya sebagai Pak Usin bersama kelompok tentara melancarkan perlawanan gerilya terhadap Belanda di wilayah

Kediri, Jawa Timur. Secara formal ia membentuk Gabungan Pembela Proklamasi dan melakukan agitasi melalui siaran radio pada tanggal 21 Desember 1948, yang pokok pembicaraannya adalah rakyat harus menolak berunding dengan Barat, serta menuduh Soekarno dan Hatta sebagai pengkhianat perjuangan RI dan kaki tangan Belanda (Kahin, 2013: 485). Namun, Tan Malaka terlalu tinggi memperkirakan kekuatan militernya dan dukungan rakyat yang dapat dihipungnya. Pasukan reguler TNI di wilayah Tan Malaka yang dipimpin oleh Kolonel Sungkono dan Letkol Surachmad mengeluarkan surat rahasia yang memutuskan untuk menangkis aksi Tan Malaka, kemudian menangkap dan membubarkan satuan-satuan yang mendukung. Sebagai buntut dari penangkapan, Tan Malaka pun menjadi tumbal revolusi, ia tewas di tangan tentara pada tanggal 21 Februari 1949 di sebuah desa lereng Gunung Wilis dekat Kediri, Jawa Timur (Ricklefs, 2016: 349).

Partai Murba dan Kepahlawanan Tan Malaka

Setelah Tan Malaka tewas, Partai Murba diwariskan kepada kader muda diantaranya Iwa Kusumasumantri, Chaerul Saleh, Adam Malik, Sukarni, Prijono. Walau terdiri dari pemuda yang bersemangat, namun dalam organisasi mereka tidak terlalu berpengalaman dan kurang andal. Di sisi lain, kisah dan nama besar Tan Malaka dijadikan legenda, tetapi pemikirannya tidak dijabarkan dalam bentuk aksi, dan mesin partai tidak berjalan. Pada Pemilihan Umum 1955 adalah pengalaman pahit sekaligus kemunduran bagi Partai Murba yang hanya mendapat 2 kursi dari 257 kursi yang diperebut. Namun, di tahun 1959 pasca Dekrit Presiden, demokrasi terpimpin memberi peluang bagi Partai Murba untuk bangkit kembali dan menjadi penyeimbang PKI. Bukti diterimanya Partai Murba oleh Soekarno adalah dijadikannya Tan Malaka sebagai pahlawan nasional pada tahun 1963, dan kader Murba seperti Chaerul Saleh dan Prijono masuk kabinet, sementara Adam Malik dan Sukarni sebagai duta besar Moskow dan Beijing (Poeze, 2013: 158).

Keberadaan Partai Murba tidak berlangsung lama karena berhadapan dengan PKI. Pada Januari 1965 partai ini dibekukan dan dibubarkan karena dituduh menerima uang US \$ 100 juta dari CIA untuk menggulingkan Soekarno (Adam, 2015: 72). Namun, semua berubah setelah tanggal 30 September 1965 melemahnya kekuatan Soekarno dan naiknya Soeharto. Partai Murba diizinkan muncul kembali ke panggung politik, meskipun latar belakang komunis tetap dibawanya. Partai Murba ikut dalam pemilihan umum pertama Orde

Baru, mereka hanya memperoleh 0,09 persen suara (48.000 suara), tidak lama kemudian partai ini harus ikut berfusi dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Atas berbagai masalah internal partai ini mengalami beberapa kali perubahan nama diantaranya Keluarga Besar Bekas Partai Murba, dan Forum Komunikasi Unsur Murba. Di tahun 1981 partai ini keluar dari PDI dan menamakan diri sebagai Forum Komunikasi Keluarga Besar Murba (Poeze, 2013: 162–163).

Tidak jauh beda dengan nasib Partai Murba, kepahlawanan Tan Malaka di era Orde Baru pun untuk sementara terabaikan, untuk tidak dikatakan di(ter)lupakan. Dalam Album Pahlawan Bangsa yang terbit 18 cetakan ulang antara 1977 dan 2003 disediakan dua halaman untuk setiap pahlawan. Namun, potret dan biografi Tan Malaka tidak ditemukan. Selain itu, nama Tan Malaka juga tidak mendapat tempat penghargaan sebagai nama jalan, gedung, atau universitas. Sepanjang Orde Baru nama Tan Malaka memudar dari ingatan kolektif. Dalam buku pelajaran sekolah ia disebut –jika disebut- dalam beberapa baris sebagai seseorang yang memperlemah persatuan dalam perjuangan revolusi (Poeze, 2013: 156). Narasi sejarah Orde Baru menempatkan Tan Malaka sebagai tokoh partai radikal yang dituduh terlibat gerakan revolusi menentang pemerintahan yang sah, padahal Tan Malaka justru menolak pemberontakan PKI di tahun 1926-1927. Ia juga sama sekali tidak terlibat dalam peristiwa Madiun 1948, bahkan dalam berbagai peristiwa, Murba berseberangan dengan PKI (Samidi & Suharno, 2019: 143).

Menjelang tahun 1980, nama Tan Malaka mulai mendapat perhatian yang ditandai dengan arus balik penulisan sejarah Tan Malaka, terutama melalui tulisan akademisi Harry A. Poeze di Belanda dan Helen Jarvis di Australia. Pada Agustus 1977, Jurnal Prisma menerbitkan nomor khusus “Manusia dalam Kemelut Sejarah” yang memuat tulisan Alfian “Tan Malaka: Pejuang Revolusioner yang Kesepian” (Adam, 2015: 102). Di tahun 1988 tulisan Harry A. Poeze *Tan Malaka: Pergulatan Menuju Republik (1997-1925)* untuk pertama kali diterbitkan oleh penerbit Grafiti Press dan diberi pengantar oleh Alfian, namun setelah laku sebanyak 2.700 eksemplar pada bulan Mei 1989 buku tersebut dilarang oleh Kejaksaan Agung. Sebagaimana yang diberitakan oleh media *Kompas* (18/5/1989) bahwa buku tersebut dilarang beredar karena sarat dengan ajaran-ajaran Marxisme-Komunisme. Isi buku tersebut menonjolkan pribadi Tan Malaka sebagai seorang intelektual yang gigih, militan,

dan revolusioner. Selain itu pemikiran dan analisis Tan Malaka mengenai kelas sosial dipandang dapat merangsang berkembangnya Marxisme-Komunisme (Poeze, 2013: 161).

Pasca reformasi tampak tidak banyak perubahan yang terjadi, Tan Malaka masih tetap menjadi pahlawan yang dilupakan, namanya tetap tidak ada dalam buku Album Pahlawan Nasional. Sementara itu, kelompok Murba menamakan diri sebagai Musyawarah Rakyat Banyak ikut serta dalam pemilihan umum di tahun 1999, partai ini hanya memperoleh 62.000 suara atau 0,06 persen dari suara total. Sesuatu yang menarik pasca reformasi adalah karya-karya Tan Malaka yang di zaman Orde Baru dilarang untuk terbitkan kemudian dapat diterbitkan. Banyak ilmuan mencoba menaruh perhatian pada pemikiran Tan Malaka dengan menulis buku-buku mengenai biografi hingga pemikirannya. Beberapa buku yang ditulis mengenai Tan Malaka seperti karya Magnis Suseno *Dalam Bayangan Lenin: Enam Pemikir Marxisme dari Lenin sampai Tan Malaka*, Hari Prabowo *Perspektif Marxisme: Tan Malaka: Teori dan Praksis Menuju Republik*, Ahmad Suhelmi *Dari Kanan Islam hingga Kiri Islam*, Safrizal Rambe *Pemikiran Politik Tan Malaka*, Fahsin Fa'al *Negara dan Revolusi Sosial: Pokok-pokok Pikiran Tan Malaka*, Hasan Nasbi *Filosofi Negara Menurut Tan Malaka*, dan Eko P. Dharmawan *Agama Itu Bukan Candu: Tesis-tesis Feuerbach, Marx, dan Tan Malaka*, serta karya fenomenal Harry A. Poeze *Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia* yang puluhan tahun ditelitinya.

KESIMPULAN

Tan Malaka adalah seorang revolusioner yang antara lain menerima Marxisme sebagai petunjuk, tetapi jauh di lubuk hatinya lebih meresapkan nasionalisme. Tan Malaka secara radikal menentang kolonialisme dan mengorbankan kehidupan pribadinya dalam proses itu. Bukti dari nasionalisme Tan Malaka terletak pada karya tulisnya yang selalu menyangkut masalah nasional, permasalahannya selalu dimulai dengan Indonesia, serta menawarkan gagasan yang futuristik. Gagasan, program, strategi, taktik, dan metodologi berjuang untuk mencapai Indonesia merdeka dalam bentuk republik sudah dicetuskannya pada tahun 1925, 20 tahun sebelum Indonesia merdeka yang tertuang dalam *Naar de Republiek Indonesia*.

Walaupun revolusi total “merdeka seratus persen” yang digaungkan Tan Malaka mengalami kegagalan, namun konsep revolusi tersebut sebenarnya tetap eksis hingga

sekarang, terutama berkenaan dengan kajian kritis mengenai situasi kenegaraan saat ini. Semangat nasionalisme dan kepercayaannya kepada kekuatan sendiri yang tinggi, sebagaimana diperlihatkan oleh rakyat Vietnam. Walau secara materi dan senjata lemah, tetapi mereka berhasil membuktikan bahwa pada akhirnya visi revolusi totalnya bisa dimenangkan.

Walaupun sampai saat ini Tan Malaka masih menempati posisi yang “redup” sebagai pahlawan nasional, namun Tan Malaka telah menunjukkan jati dirinya sebagai pejuang sejati sampai akhir hidupnya. Kehadiran sejarah kontroversi Tan Malaka sudah selayaknya mendapat tempat dalam pendidikan sejarah di sekolah-sekolah. Hal ini dalam rangka untuk meningkatkan daya kritis (*critical thinking*) siswa dalam memahami narasi sejarah Indonesia, artinya bukan hanya berkenaan dengan sejarah yang tertulis dalam buku teks. Selain itu menghadirkan sosok Tan Malaka dengan segala bentuk sikap dan perjuangan yang telah dilakukannya akan membangun inspirasi dalam belajar sejarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T., & Surjomiharjo, A. (Ed.). (1985). *Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif*. Jakarta: Gramedia.
- Adam, A. W. (2015). Tan Malaka Ditembak di Jawa Timur. Dalam K. O. Santosa (Ed.), *Tan Malaka dan Syahrir dalam Kemelut Sejarah*. Bandung: Segarsy.
- Ahmad, T. A. (2016). *Sejarah Kontroversial di Indonesia (Perspektif Pendidikan)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Carr, E. H. (2014). *Apa Itu Sejarah?* Depok: Komunitas Bambu.
- Faisal, & Syam, F. (2015). Tan Malaka, Revolusi Indonesia Terkini. *POLITIK*, 11. Diambil dari <http://journal.unas.ac.id/politik/article/view/118>
- Gottschalk, L. (1975). *Mengerti sejarah* (Nugroho Notosusanto, Ed.). Jakarta: UI Press.
- Gustaman, R. F. (2017). Tan Malaka (Ditinjau dari prespektif perjuangan bangsa). *Jurnal Artefak*, 4, 61–66.
- Jarvis, H. (1987). Tan Malaka: Revolutionary or renegade? *Bulletin of Concerned Asian Scholars*, 19, 41–54.

- Kahin, A. (2008). *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatra Barat dan Politik Indonesia (1926-1998)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kahin, G. M (2013). *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia* (Tim Komunitas Bambu, Penerj.). Depok: Komunitas Bambu.
- Kartodirdjo, S. (2014). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Kleden, I. (2015). Tan Malaka: Nasionalisme Seorang Marxis. Dalam K. O. Santosa (Ed.), *Tan Malaka dan Syahrir dalam Kemelut Sejarah*. Bandung: Segi Arsy.
- Kochhar, S. K. (2008). *Pembelajaran Sejarah: Teaching of History*. Jakarta: Grasindo.
- Kusno, A. (2003). From City to City: Tan Malaka, Shanghai and the Politics of Geographical Imagining. *Singapore Journal of Tropical Geography*, 24, 327–339.
- Malaka, T. (2013a). *Aksi Massa*. Jakarta: LPPM Tan Malaka.
- Malaka, T. (2013b). *Naar De Republiek Indonesia*. Jakarta: LPPM Tan Malaka.
- Malaka, T. (2016). *Dari Penjara ke Penjara*. Jakarta: Penerbit Narasi.
- Mrázek, R. (1972). Tan Malaka: A Political Personality's Structure of Experience. *Indonesia*, 1–48.
- Poespoprodjo. (1987). *Subjektivitas dalam Historiografi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Poeze, H. A. (2008). *Tan Malaka Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia jilid 4: September 1948-Desember 1949*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Poeze, H. A. (2013). Memuliakan, Mengutuk, dan Mengangkat Kembali Pahlawan Nasional: Kasus Tan Malaka. Dalam H. S. Nordholt, B. Purwanto, & R. Saptari (Ed.), *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia* (hlm. 155–176). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Poeze, H. A. (2015). Kerjasama Singkat Tan Malaka dan Sjahrir. Dalam *Tan Malaka dan Sjahrir dalam Kemelut Sejarah*. Bandung: Segi Arsy.
- Ricklefs, M. C. (2016). *Sejarah Indonesia Modern* (Dharmono Hardjowidjono, Penerj.). Yogyakarta: UGM Press.
- Samidi, R., & Suharno, S. (2019). Mengurai Gagasan Tan Malaka sebagai Bentuk Kontribusi Terhadap Pemerintah Republik Indonesia. *Forum Ilmu Sosial*, 46, 142–153.

Sjamsuddin, H. (2012). Model Pendekatan Pembelajaran Sejarah dari Isus-Isu Kontroversial, Sejarah-Komparatif ke Analisis Tekstual. *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, 2. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v2i1.764>

Sjamsuddin, H. (2016). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.

Sumardiansyah, S. (2015). Paradigma dalam Pembelajaran Sejarah Kontroversi. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 4, 77–88.

Suryadinata, Y. R. & Aman. (2016). Konsep Murba dalam Pandangan Tan Malaka (1922-1948). *Risalah*, 1. Diambil dari <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/ojs/index.php/risalah/article/view/919>